

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANTUL**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Juga masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera .

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2021. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan. Juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut. Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di tahun-tahun berikutnya.

Demikian, semoga bermanfaat.

Bantul, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bantul

**Stephanus Herus Wismantara, SIP.MM.**

NIP. : 196512261986021001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
3. Sistematika Penulisan CALK .....	5
<b>BAB II       EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN</b>	
<b>DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>6</b>
1. Ekonomi Makro .....	6
2. Kebijakan Keuangan .....	9
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja .....	10
<b>BAB III      IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>12</b>
1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja.....	12
2. Hambatan dan Kendala .....	12
<b>BAB IV      KEBIJAKAN AKUTANSI .....</b>	<b>14</b>
1. Entitas Akutansi .....	14
2. Basis Akutansi.....	14
3. Basis Pengukuran .....	14
4. Penerapan Kebijakan.....	14
<b>BAB V       PENJELASASN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>15</b>
1. Rincian Masing-masing Pos .....	15
<b>BAB VI      PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>16</b>
A. Umum.....	16
B. Khusus.....	16
<b>BAB VII     PENUTUP .....</b>	<b>17</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

#### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah kabupaten yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- l. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

### 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Bab II Ekonomi Makro

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan

Bab VII Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**1. Ekonomi Makro**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kebangsaan Bantul berpengaruh terhadap ekonomi makro, baik di sekitar rill maupun sektor non rill. Out come-nya memang tidak langsung kelihatan seperti pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain. Akan tetapi situasi sosial politik yang kondusif akan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Tidak akan mungkin kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar jika tidak didukung dengan stabilitas sosial politik yang kondusif. Di sinilah peran penting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022

Sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.400.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.700.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.400.844.851
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.143.267.039
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	3.325.000

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	5.100.000
III	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.266.500
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.155.414
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.398.400
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.398.400
IV	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000
V.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.700.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.886.200
VI	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.854.300
2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.650.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.958.495



No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	526.282.000
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	526.282.000
1.	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	526.282.000
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	2.395.378.400
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.395.378.400
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.395.378.400
D.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	61.000.000
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	61.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	61.000.000
E.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	604.754.232
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	604.754.232
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	604.754.232
F	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.147.600
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.240.400
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	
G	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	
I	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	
1.	Pembinaan Jaga Warga	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	

## 2. Kebijakan Keuangan

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	18.500.000	18.500.000
1.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	8.400.000	8.400.000
2.	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	1.700.000	1.700.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.400.000
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.400.844.851	1.377.966.863
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.143.267.039	1.135.410.000

3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	3.325.000	<b>3.325.000</b>
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	5.100.000	<b>5.085.000</b>
III	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.266.500	<b>2.266.500</b>
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.155.414	<b>13.155.000</b>
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.398.400	<b>18.399.000</b>
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	<b>900.000</b>
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.398.400	<b>114.381.500</b>
IV	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000	<b>4.200.000</b>
V.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.700.000	<b>1.287.109</b>
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.886.200	<b>119.886.240</b>
VI	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.454.850	<b>154.151.800</b>

2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	<b>5.000.000</b>
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.650.000	<b>10.850.000</b>
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.958.495	<b>23.958.100</b>
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	526.282.000	<b>510.176.750</b>
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	526.282.000	<b>510.176.750</b>
1.	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	526.282.000	<b>510.176.750</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	2.395.378.400	<b>2.395.378.400</b>
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.395.378.400	<b>2.395.378.400</b>
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.395.378.400	<b>2.395.378.400</b>
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	61.000.000	<b>61.000.000</b>
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61.000.000	<b>61.000.000</b>
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	61.000.000	<b>61.000.000</b>
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	604.754.232	<b>583.402.750</b>
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	604.754.232	<b>583.402.750</b>

1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	604.754.232	<b>583.402.750</b>
F	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.417.600	<b>4.367.500</b>
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.240.400	<b>285.975.000</b>
	JUMLAH KESELURUHAN	6.926.080.671	<b>6.848.823.058</b>

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, Sebagai berikut :

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA**

**DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (OUT PUT)	CAPAIAN HASIL (OUT COME)	KET
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)			
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.793.401.761,00	2.540.281.124	.		
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan dan AKIP 2022	Renstra ,Renja , Dokumen AKIP	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00			
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.318.225.763,00	2.066.847.583,00	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN					
III	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	159.044.943,00	<b>159.006.750,00</b>			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.475.000,00	<b>2.475.000,00</b>	Tersedia Alat Listrik	Mengganti alat Listrik yang mati atau Rusak	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.684.000,00	<b>19.684.000,00</b>	Terlaksananya kebutuhan peralatan dan perlengkapankantor	Tersedia Alat Tulis Kantor dan Bahan, alat Kebersihan	
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.204.443,00	<b>18.204.250,00</b>	Persediaan Barangf Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetak blangko2 dan Copy surat2 dan arsip lancar	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	<b>2.400.000,00</b>	.Tersedia Barang bacaan Koran	Bahan Bacaan Koran untuk informasi dalam daerah dan luar daerah tersedia	
5.	Penyediaan Bahan/Material	4.600.000,00	<b>4.600.000,00</b>	Tersedia Souvenir dan tanaman Hias	Tersedia Souvenir untuk Tukar Cindera mata tamu Undangan dari Luar Daerah	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.681.500,00	<b>111.643.500,00</b>	Tersedianya makan dan minum rapat,perjalanan dalam dan luar daerah	SPPD Luar Daerah Karena Pandemi ada beberapa kegiatan yang diPending	
IV	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	70.414.517,00	<b>70.413.000,00</b>	Workshop Kominda, Workshop pembinaan satuan keamanan lingkungan, Rakor Kominda, dan Rakor Penanganan Konflik Sosial.	Terwujudnya keamanan lingkungan	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.414.517,00	<b>70.413.000,00</b>	Rakor Tim, Sosialisasi jaga warga, Workshop FKDM, Diskusi Kelompok masyarakat, diskusi pemberdayaanmasyarakat untuk perangkat desa	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat dan keamanan lingkungan	
V.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	106.811.040,00	<b>106.184.191,00</b>	.		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	<b>0</b>			
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000,00	<b>644.191,00</b>	Pembayaran Telepon dan listrik	Terpenuhi Pembayaran Telepon dan Listrik	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.611.040,00	<b>105.540.000,00</b>	Honor bagi tenaga teknis penjaga malam dan petugas kebersihan	Terbayarnya Honor bagi tenaga teknis penjaga malam dan petugas kebersihan	
VI	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	124.505.500,00	<b>123.429.600,00</b>			



1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.150.000,00	<b>97.100.800,00</b>	Servis, suku cadang dan BBM kendaraan	Terwujudnya kenyamanan mobilitas dalam bekerja	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.200.000,00	<b>3.198.800,00</b>	Jasa Pajaaak Kendaraan Bermotor Dinas	Pajak STNK Motor & Mobil terpenuhi	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	<b>8.520.000,00</b>	Terlaksana Pembelian Laptop,LCD dan AC	Pekerjaan Berjalan Lancar	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.635.500,00	<b>14.610.000,00</b>	Pemeliharaan gedung	Kenyamanan dalam bekerja	
<b>B</b>	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	410.289.300,00	<b>409.014.300,00</b>	<b>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila bagi Warga Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kewangsaan Bagi Warga Masyarakat</b>	

I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	410.289.300,00	<b>409.014.300,00</b>			
1.	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	410.289.300,00	<b>409.014.300,00</b>			
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	2.330.972.100,00	<b>2.323.920.900,00</b>	Sosialisasi dan TOT Pemilos batal dilaksanakan karena Pandemi Bimtek Pendampingan pengurus parpol Verifikasi proposal bantuan parpol Terlaksananya dialog politik, Desk Pilkada 2020	Peningkatan pemahaman demokrasi di masyarakat.	
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.330.972.100,00	<b>2.323.920.900,00</b>			

1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.330.972.100,0 0	<b>2.323.920.900,00</b>			
D.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	39.800.000,00	<b>39.798.500,00</b>	Workshop Ormas, Verifikasi Ormas ,dan FGD Ormasy	Tersedianya data dan informasi ormas,orsos dan LSM	
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	39.800.000,00	<b>39.798.500,00</b>			
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	39.800.000,00	<b>39.798.500,00</b>			
E.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	468.551.000,00	<b>467.991.000,00</b>	Dialok dan Raker FKUB, FGD dan Raker FPK, Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Raker P4GN,Sosialisasi Bahaya Narkoba,	Dokumen Laporan hasil Raker dan Peningkatan Kesadaran bahaya Narkoba bagi Masyarakat dan generasi Muda	
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	468.551.000,00	<b>467.991.000,00</b>			

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	468.551.000,00	<b>467.991.000,00</b>		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	245.312.000,00	<b>245.311.500,00</b>	FGD dan Rakor Penanganan Konflik, FGD dan Rakor Kominda,Rakor FKDM	Dokumen Laporan Hasil Rapat koordinasi,Terciptanya Stabilitas di Masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	245.312.000,00	<b>245.311.500,00</b>		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	245.312.000,00	<b>245.311.500,00</b>		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	6.288.326.163,00	<b>6.026.317.323,00</b>		
G	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>				
I	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA				
1.	Pembinaan Jaga Warga				

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul**

Belanja Operasi sebesar

Jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar	Rp. 176.012.000,00
Jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar	Rp 1.884.927.959,00
Jumlah SP2D tambah uang (TU) sebesar	Rp 354.613.990,00
Jumlah SP2D LS	Rp, 1.962.313.400,00
Jumlah LS ( gaji Tukin )	<u>Rp 2.513.377.407,00</u>
Jumlah Total Penerimaan	Rp. 6.891.244.756,00
dari total anggaran	Rp 6.926.080.671,00
Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar	Rp 6.848.823.056,00

( Enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah)

Sedangkan saldo kas yang disetor ke Kasda sebesar Rp42.421.700,00 (Empat puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah )

**2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2022 adalah kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurang personil.

Dari sisi sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih perlu ditambah dan ditingkatkan SDM-nya. Sebagai gambaran dari 18 pegawai, 1 berpendidikan pasca sarjana, 7 Pegawai yang berpendidikan sarjana, SMA ada 8 pegawai , sedangkan ada 2 pegawai tidak tetep di Kabupaten Bantul. Disamping diperlukan penempatan SDM yang sesuai kemampuan, juga diperlukan pelatihan-pelatihan misalnya untuk pembuatan laporan keuangan administrasi, komputer dll.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### 1. Entitas Akuntansi

Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

#### 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis aktual dalam pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

#### 3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

#### 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat diukur dengan satuan uang.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### A. Umum

Secara umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2019 sudah dapat berjalan tertib dan lancar. Namun ada satu kegiatan yang menyisakan anggaran cukup banyak yaitu:

#### **I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**

Maksud dan tujuan program ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan sebesar 95% dengan realisasi 95%. Pagu anggaran sebesar Rp410.289.300,- dengan realisasi sebesar Rp409.014.300,00 atau 99.68%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

1). Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan target 100% realisasi 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp410.289.300,00 terealisasi sebesar Rp 409.014.300,00 atau 99.68 %.

Kegiatan ini terdiri dari satu subkegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan . Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Pelaksanaan lomba upacara SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (masing-masing kecamatan satu jenjang sekolah)
- Pemantapan peserta wawasan kebangsaan untuk siswa sekolah dan umum (10 kali)



## **II. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.**

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi anggaran program Rp2.330.972.100,00 dengan realisasi Rp 2.323.920.900,00 atau 99.69 %, adapun kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pagu anggaran sebesarRp2.330.972.100,00 dengan realisasi Rp 2.323.920.900,00 atau 99.69 %,

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

-Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananyaKebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah adapun bentuk dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Dialog Politik
- TOT dan Sosialisasi Pemilos.
- Bimtek dan Verifikasi Bantuan Parpol.

## **III. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk meningkatkan Persentase Pemilih yang berpartisipasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100% adapun kegiatan nya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100%.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tercapainya Cakupan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu sebesar Rp39.800.000,00 terealisasi sebesar Rp39.798.500,00 atau 100%. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya kebijakan dibidang Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah, adapun dalam bentuk :

- FGD Ormas, Orsos dan LSM
- Mediasi Persengketaan Ormas, Orsos dan LSM
- Pendaftaran , Pendataan, Verifikasi Ormas, Orsos dan LSM
- Rapat Koordinasi Ormas, Orsos dan LSM.

### **III. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tercapainya Persentase FKUB yang aktif di tingkat Kecamatan Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%.

Adapun kegiatan sebagai berikut:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%.

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya Kerukunan antar umat beragama.

dengan sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahPagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp468.551.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.991.000,00 atau 99.88%.dengan maksud dan tujuan sub kegiatan ini Tercapainya Kebijakan di bidang Ketahanan ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah . Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Dialog & Rapat Kerja FKUB( Forum Kerukunan Umat Beragama)
- FGD & Rapat Kerja FPK ( pembauran Kebangsaan )
- Konseling Pelajar di daalam kelas
- Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
- Penyuluhan Narkotika & Rapat Kerja P4GN

IV. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kuaaalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM Tingkat KecamatanPagu anggaran ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %.

Adapun kegiatan sebagai berikut :Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM aktif Tingkat Kecamatan Pagu anggaran ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %.

Dengan sub kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp245.312.000,00 terealisasi sebesar Rp 245.311.500,00 atau 99.99 %. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini :terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah adapun bentuk nya sebagai berikut :

- FGD & Raapat penanganan konflik social
- FGD & rapat POA
- FGD & rapat Tertutup
- FGD & Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
- Pelaaatihan FKDM
- Pemantauan & pembinaan Satuan keamanan di masyarakat
- Pemberdayaan perangkat desa
- Pembayaran honor Tim PKS dan FKDM.

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Bantul, Januari 2022  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bantul

**St. HERU WISMANTARA, SIP.MM**

NIP. : 196512261986021001